

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

## **SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA DENGAN KODAM JAYA DALAM RANGKA TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR**

Ircham Effendy<sup>1</sup>  
Agus Subagyo<sup>2</sup>  
Agustina Setiawan<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### **Abstract**

*Flood disasters remain a recurring threat in Jakarta, driven by geographical vulnerabilities, rapid urbanization, and limited drainage capacity. Addressing such disasters requires coordinated and integrated responses across multiple stakeholders. This study examines the synergy between the DKI Jakarta Regional Government and Kodam Jaya in the context of emergency flood response. Employing a descriptive qualitative approach, the research gathered data through literature review, documentation, and in-depth interviews with key informants from Kodam Jaya, the Jakarta Regional Disaster Management Agency (BPBD), and affected communities. The analysis focuses on three dimensions of synergy: communication, coordination, and collaboration. Findings reveal that joint efforts have been undertaken, including integrated evacuation, logistics distribution, and the establishment of disaster posts. However, several challenges remain, such as fragmented communication, overlapping roles, and the lack of standardized joint operational procedures. The study concludes that strengthening coordination forums, implementing integrated SOPs, and conducting regular joint training are essential to enhance the effectiveness of institutional synergy. Theoretically, this research contributes to the literature on collaborative governance in disaster management, while practically offering insights for policymakers and security institutions to build adaptive and responsive strategies against recurrent flood risks in urban settings.*

**Keywords : Synergy, Disaster Management, Emergency Flood Response, Collaborative Governance.**

### **PENDAHULUAN**

Banjir di DKI Jakarta merupakan bencana yang selalu hadir hampir setiap musim hujan dengan dampak yang meluas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta keberlangsungan infrastruktur kota. Kondisi geografis Jakarta yang didominasi dataran

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

rendah, aliran 13 sungai besar yang bermuara ke Teluk Jakarta, serta tingginya laju urbanisasi menjadikan kota ini rentan terhadap banjir. Ketika curah hujan ekstrem terjadi baik di wilayah Jakarta maupun kawasan hulu, debit air meluap sehingga genangan meluas hingga permukiman, fasilitas umum, dan kawasan strategis. Dampak banjir bukan hanya berupa kerugian materiil yang ditaksir triliunan rupiah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, penyakit menular, serta kerugian ekonomi akibat terhentinya aktivitas masyarakat (Nasution et al., 2022; BNPB, 2021).

Dalam konteks penanggulangan, banjir Jakarta tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga saja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki mandat melalui BPBD sebagai leading sector, tetapi kompleksitas bencana sering kali melampaui kapasitasnya. Oleh karena itu, keterlibatan TNI, khususnya Kodam Jaya, sangat penting dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kodam Jaya memiliki personel teritorial hingga Babinsa, serta fasilitas dan peralatan yang dapat dikerahkan dengan cepat. Sinergi Pemda–Kodam menjadi prasyarat agar respons tanggap darurat banjir lebih cepat, terarah, dan efektif (Ircham Effendy, 2025).

Secara teoretis, sinergitas dipahami sebagai proses kolaboratif yang menghasilkan capaian lebih besar daripada jika aktor bekerja sendiri. Tiga unsur utama sinergi adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi (Covey, 2013; Thomson & Perry, 2006). Kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kolaborasi hanya akan berhasil apabila ada forum bersama, kepemimpinan fasilitatif, mekanisme pertukaran informasi, dan trust antaraktor. Pendekatan ini sangat relevan dengan pengelolaan bencana perkotaan yang melibatkan institusi sipil–militer.

Dalam praktiknya, meski kerangka hukum telah ada, implementasi sinergitas di Jakarta sering menghadapi hambatan. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan SOP antar lembaga, dan kurangnya latihan bersama membuat operasi darurat tidak selalu berjalan mulus. Penelitian ini hadir untuk menganalisis bentuk sinergitas yang sudah berjalan, mengidentifikasi hambatan utama, serta menawarkan strategi penguatan agar

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

ke depan Pemda DKI Jakarta dan Kodam Jaya mampu membangun tata kelola tanggap darurat yang lebih adaptif.

Fenomena ini penting diteliti karena banjir Jakarta bukan sekadar ancaman musiman, tetapi merupakan problem struktural yang membutuhkan solusi lintas-sektoral. Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, respon cepat hanya mungkin tercapai bila sinergitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga berlangsung baik. Penelitian ini berfokus pada dinamika komunikasi, mekanisme koordinasi, serta bentuk kolaborasi dalam operasi tanggap darurat banjir.

Kontribusi penelitian ini bersifat ganda. Secara praktis, penelitian memberikan rekomendasi operasional berupa SOP terpadu, forum koordinasi permanen, serta integrasi sistem informasi antara Pemda dan Kodam Jaya. Secara teoretis, penelitian memperluas kajian mengenai collaborative governance dalam konteks kebencanaan perkotaan dengan menyoroti pengalaman sinergi sipil–militer di Jakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena sinergitas Pemda DKI Jakarta dan Kodam Jaya secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Kodam Jaya, BPBD, aparat kelurahan, serta masyarakat terdampak. Observasi lapangan turut dilakukan pada posko bencana untuk memahami praktik nyata. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kodam Jaya dalam penanganan tanggap darurat banjir merupakan proses

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Temuan di lapangan menegaskan bahwa hubungan kerja sama ini tidak dapat dilepaskan dari konteks tata kelola bencana perkotaan yang bersifat multidimensional, dengan aktor-aktor yang memiliki latar belakang, mandat, dan kultur organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada bagaimana sinergitas tersebut terwujud, apa saja hambatan yang dihadapi, serta sejauh mana dimensi-dimensi teoretis dapat menjelaskan dinamika empiris yang terjadi.

Pendekatan collaborative governance memberikan kerangka yang tepat untuk membaca fenomena ini karena menempatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai pilar utama hubungan antaraktor. Ketiga dimensi ini bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan dapat diamati secara langsung dalam praktik operasi tanggap darurat di Jakarta. Komunikasi diperlukan untuk memastikan informasi yang cepat dan tepat, koordinasi menjamin keselarasan tindakan antar lembaga, sedangkan kolaborasi menjadi tahap lanjut di mana sumber daya dan strategi benar-benar digabungkan untuk mencapai hasil maksimal.

Dalam konteks penelitian ini, setiap dimensi memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahannya masing-masing. Komunikasi terbukti sudah berjalan baik tetapi masih menghadapi hambatan dalam konsistensi informasi. Koordinasi terlihat dari pembagian peran formal namun terkendala perbedaan SOP dan struktur organisasi. Kolaborasi terwujud dalam operasi lapangan seperti evakuasi dan logistik, tetapi masih bersifat reaktif dan kurang terprogram. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan tiga dimensi utama tersebut: komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

#### *Dimensi Komunikasi*

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam membangun sinergitas antar lembaga. Dalam konteks penanggulangan banjir di DKI Jakarta, komunikasi antara

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Pemda dan Kodam Jaya telah terjalin melalui mekanisme formal seperti rapat koordinasi, posko terpadu, serta laporan situasi yang dikeluarkan secara periodik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa di lapangan komunikasi sering kali dilakukan melalui jalur informal seperti aplikasi pesan instan. Jalur ini memang mempercepat distribusi informasi, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko overload pesan dan perbedaan interpretasi instruksi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat perlu diimbangi dengan sistematisasi alur pesan agar tidak terjadi disinformasi (Angelika, 2023).

Selain masalah kanal komunikasi, hasil penelitian menegaskan bahwa keterlambatan informasi merupakan salah satu hambatan utama. Beberapa informan menyatakan bahwa data mengenai lokasi terdampak sering kali datang terlambat atau berbeda antara versi Pemda dengan laporan Kodam di lapangan. Kondisi ini menyebabkan evakuasi tidak selalu tepat sasaran. Misalnya, bantuan logistik menumpuk di titik tertentu karena komunikasi lintas sektor tidak sinkron, sementara di wilayah lain masih terjadi kekurangan (Ircham Effendy, 2025).

Perspektif teoretis dari Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa komunikasi dalam collaborative governance harus bersifat deliberatif, artinya semua pihak terlibat dalam dialog yang setara dan transparan. Namun dalam kasus Jakarta, komunikasi cenderung masih bersifat hierarkis dan top-down, baik di Pemda maupun di Kodam. Meskipun hierarki memudahkan jalur komando, pola komunikasi satu arah sering menghambat partisipasi aktor lokal seperti kelurahan atau Babinsa. Akibatnya, informasi kontekstual dari masyarakat sering kali tidak cepat masuk dalam sistem pengambilan keputusan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa ada kesenjangan pemahaman antar level aparat. Informasi yang sampai di tingkat kelurahan atau Babinsa kadang berbeda dengan yang dikeluarkan posko provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

komunikasi lintas-level yang memastikan konsistensi pesan. Model multi-level communication yang diterapkan di beberapa negara dapat menjadi rujukan untuk memastikan bahwa pesan dari pusat hingga akar rumput tidak berubah esensi (Danar, 2024).

Sebagai solusi, integrasi dashboard banjir DKI Jakarta dengan sistem komunikasi militer menjadi langkah strategis. Penggunaan satu sistem berbasis data real-time yang dapat diakses Pemda, Kodam, hingga aparat lapangan akan mengurangi bias informasi. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya cepat tetapi juga akurat, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif.

#### *Dimensi Koordinasi*

Koordinasi menjadi kunci efektivitas sinergi dalam situasi darurat. BPBD DKI Jakarta memiliki mandat sebagai koordinator sipil, sementara Kodam Jaya hadir dengan kekuatan komando teritorial. Di atas kertas, koordinasi ini sudah jelas: BPBD memimpin, Kodam memperkuat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangan sering kali lebih kompleks. Perbedaan prosedur operasional standar (SOP) antara Pemda dan Kodam menyebabkan kebingungan terkait siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam kondisi kritis.

Pada kasus banjir Januari 2025, misalnya, Kodam Jaya telah menurunkan pasukan dengan peralatan evakuasi, namun masih menunggu instruksi tertulis dari BPBD untuk distribusi logistik. Keterlambatan instruksi menyebabkan evakuasi korban tidak secepat yang diharapkan. Koordinasi yang seharusnya sinkron akhirnya berjalan parsial. Hal ini menegaskan bahwa koordinasi tidak cukup hanya dengan struktur formal, melainkan harus dipertegas melalui SOP terpadu yang dipahami oleh kedua belah pihak (Ircham Effendy, 2025).

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Literatur menegaskan bahwa koordinasi yang efektif memerlukan kejelasan peran, jalur komando, dan mekanisme eskalasi keputusan (Thomson & Perry, 2006). Namun di Jakarta, struktur birokrasi Pemda yang horizontal bertemu dengan struktur militer yang vertikal, sehingga koordinasi lintas budaya organisasi ini sering berbenturan. Aparat sipil cenderung menunggu prosedur formal, sementara militer terbiasa bertindak cepat berdasarkan situasi di lapangan. Perbedaan ini menciptakan celah waktu respons yang sangat krusial pada fase darurat (Civil–Military Cooperation, 2024).

Koordinasi juga menghadapi kendala anggaran dan sumber daya. Meskipun Pemda memiliki dana besar, realisasi distribusi logistik sering kali memakan waktu karena mekanisme administrasi. Sebaliknya, TNI memiliki peralatan dan personel yang siap pakai, tetapi penggunaannya tetap memerlukan legalitas dari pemerintah sipil. Inilah yang menegaskan pentingnya nota kesepahaman (MoU) atau peraturan bersama yang lebih detail.

Untuk memperbaiki kondisi ini, koordinasi harus difasilitasi melalui forum permanen yang melibatkan BPBD, Kodam, Polri, PMI, dan komunitas lokal. Forum ini berfungsi tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada fase pra-bencana untuk menyusun rencana kontinjensi bersama. Dengan demikian, ketika bencana datang, koordinasi bukan dimulai dari nol, tetapi berdasarkan kesepahaman yang telah diuji melalui latihan dan simulasi.

### *Dimensi Kolaborasi*

Kolaborasi adalah dimensi tertinggi dari sinergitas, di mana aktor tidak hanya bertukar informasi dan menyelaraskan tindakan, tetapi juga merancang solusi bersama dan berbagi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi antara Pemda DKI Jakarta dan Kodam Jaya sudah terlihat dalam pendirian posko terpadu, dapur umum, serta evakuasi bersama. Kolaborasi ini menghasilkan efektivitas

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

tinggi terutama pada fase awal tanggap darurat, karena menggabungkan kekuatan Pemda dalam data dan fasilitas sosial dengan keunggulan militer dalam mobilisasi dan logistik.

Namun, sifat kolaborasi tersebut masih dominan reaktif, muncul ketika bencana telah meluas. Pada fase pra-bencana, kolaborasi belum maksimal. Latihan gabungan yang seharusnya memperkuat kesiapsiagaan masih jarang dilakukan. Akibatnya, pemahaman bersama tentang SOP dan peran masing-masing belum merata di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Danar (2024) yang menyebutkan bahwa kolaborasi hanya akan efektif jika ada rutinitas interaksi yang terprogram, bukan sekadar respons situasional.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kolaborasi Pemda–Kodam belum banyak melibatkan aktor non-pemerintah, padahal masyarakat, relawan, dan sektor swasta memiliki kapasitas besar untuk mendukung operasi. Misalnya, relawan lokal sering kali menjadi pihak pertama yang membantu evakuasi warga sebelum bantuan resmi datang. Namun, mereka belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur posko terpadu. Padahal, pendekatan *whole of society* dalam manajemen bencana menekankan kolaborasi lintas aktor untuk memperkuat legitimasi dan cakupan respons (UNFCCC, 2023).

Kolaborasi juga diuji dalam pengelolaan logistik. TNI memiliki kekuatan transportasi dan gudang, sementara Pemda memiliki data penerima bantuan. Namun, karena belum ada sistem logistik terpadu, distribusi bantuan sering tidak seimbang. Kolaborasi di sektor logistik memerlukan integrasi sistem inventaris, pemetaan kebutuhan riil, serta mekanisme distribusi bersama yang berbasis data. Jika sistem ini berjalan, maka distribusi tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran (Civil–Military Cooperation, 2024).

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

---

Secara konseptual, kolaborasi yang baik harus menghasilkan win-win outcomes, yaitu keuntungan bersama yang lebih besar daripada bila aktor bekerja sendiri (Covey, 2013). Namun di Jakarta, kolaborasi masih sering bersifat win-lose, di mana satu pihak lebih dominan. Oleh karena itu, penting untuk membangun trust yang setara antara Pemda dan Kodam melalui kesepahaman visi bersama, pelatihan gabungan, serta mekanisme evaluasi pasca-bencana.

Pada akhirnya, kolaborasi menjadi dimensi yang paling menentukan dalam efektivitas sinergitas Pemda–Kodam. Komunikasi dan koordinasi memang fondasi, tetapi tanpa kolaborasi yang intens dan terprogram, sinergi hanya akan menjadi formalitas. Kolaborasi harus meluas ke fase pra-bencana, melibatkan lebih banyak aktor, dan difasilitasi dengan teknologi informasi agar respons darurat banjir Jakarta lebih adaptif dan inklusif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana sinergitas antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Kodam Jaya dalam rangka tanggap darurat bencana banjir terbentuk dan beroperasi. Kompleksitas banjir sebagai bencana perkotaan menuntut kerja sama lintas-sektoral yang tidak hanya mengandalkan satu lembaga, melainkan melibatkan berbagai aktor dengan kapasitas dan mandat berbeda. Pendekatan collaborative governance dengan dimensi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi menjadi kerangka analitis yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemda DKI Jakarta dengan Kodam Jaya telah berjalan melalui jalur komunikasi formal dan informal, mekanisme koordinasi pada level struktural dan operasional, serta kolaborasi dalam evakuasi, distribusi logistik, dan pendirian posko terpadu. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas sinergitas, antara lain keterlambatan dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

inkonsistensi informasi, perbedaan SOP antar lembaga, tumpang tindih kewenangan di lapangan, keterbatasan latihan gabungan, serta minimnya integrasi relawan dan komunitas lokal ke dalam struktur formal penanggulangan bencana.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi merupakan pilar utama yang harus diperkuat agar sinergitas tanggap darurat banjir di Jakarta lebih adaptif dan efektif. Penelitian ini juga memperkaya literatur collaborative governance dengan memberikan bukti empiris tentang dinamika sinergi sipil–militer di konteks perkotaan yang penuh tantangan. Di sisi lain, rekomendasi praktis dari penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah, Kodam Jaya, serta aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan bencana di Jakarta.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah strategis dapat diajukan, diantaranya :

*Pertama*, diperlukan penyusunan dan implementasi SOP terpadu antara Pemda DKI Jakarta dan Kodam Jaya yang menjelaskan alur komunikasi, mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta tata cara eskalasi komando di lapangan. SOP ini harus disosialisasikan hingga ke level operasional, termasuk kelurahan, Babinsa, dan relawan.

*Kedua*, perlu dibentuk forum koordinasi permanen yang melibatkan Pemda, Kodam Jaya, Polri, PMI, sektor swasta, dan komunitas lokal. Forum ini tidak hanya aktif saat bencana, tetapi juga berfungsi dalam fase pra-bencana untuk menyusun rencana kontinjensi, melaksanakan latihan bersama, dan melakukan evaluasi pasca-bencana.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

*Ketiga*, integrasi sistem informasi kebencanaan harus segera diwujudkan. Dashboard banjir DKI Jakarta perlu disinkronkan dengan sistem komunikasi militer agar data real-time dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan serta mengurangi tumpang tindih dalam distribusi logistik dan evakuasi korban.

*Keempat*, pelaksanaan latihan gabungan antara Pemda dan Kodam harus dilakukan secara rutin. Latihan ini penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterampilan teknis, memperkuat trust antar lembaga, dan memastikan SOP yang disusun dapat diaplikasikan di lapangan.

*Kelima*, pelibatan masyarakat dan relawan perlu ditingkatkan. Relawan lokal yang selama ini hadir secara spontan harus diberdayakan melalui pelatihan dasar, registrasi resmi, serta integrasi ke dalam struktur posko terpadu. Dengan demikian, kapasitas masyarakat dapat menjadi bagian integral dari sistem formal penanggulangan banjir.

*Terakhir*, perlu ada mekanisme evaluasi pasca-bencana yang bersifat terbuka dan sistematis. After Action Review (AAR) harus dilaksanakan bersama oleh Pemda, Kodam, dan aktor lain untuk menilai kelemahan dan kelebihan operasi, sehingga menjadi dasar perbaikan di masa depan.

## **REFERENSI**

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. [OUP Academic](#)
- Danar, O. R. (2024). *Exploring the impact of collaboration on disaster governance implementation*. *Cogent Social Sciences*. [Taylor & Francis Online](#)
- Nasution, B. I., et al. (2022). *Urban vulnerability to floods: investigation in Jakarta*. [Journal Article]. [ScienceDirect](#)

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 12 Okt 2025*

*Published : 23 Okt 2025*

---

UNFCCC (case study). (2023). *Urban flood management in Jakarta: case study and lessons learned*. United Nations Framework Convention on Climate Change. [unfccc.int](https://unfccc.int)

Angelika, V. (2023). *Design of flood disaster monitoring dashboard for DKI Jakarta*. Jurnal IDSS (design & dashboard study). [idss.iocspublisher.org](https://idss.iocspublisher.org)

(Civil–military cooperation literature) *Civil–Military Cooperation in Natural Disaster Management* (2024). Journal/Report discussing TNI role in disaster response. [ResearchGate+1](https://www.researchgate.net)

Implementation of Military Incident Management System (2024). *Defense Journal / IDU*. (peran logistik militer dan Pusbekangad).